



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA  
**UNIT KERJA** : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUSANTO WIBOWO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 152842

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.350.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>421.000.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR / SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
3. MOTOR, KAWASAKI SEPEDA MOTOR NINJA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
4. MOBIL, MITSUBISHI / EXPANDER MINI BUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
5. MOBIL, TOYOTA / FORTUNER JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>119.000.000</b>
<b>D. SURAT BERTAGIH</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>161.569.330</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.051.569.330</b>



III. HUTANG

Rp. 174.188.217

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.877.381.113

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.